

IMPLEMENTATION OF REGIONAL MARKET REGULATION OF THE DIRECTOR COMPANY LAMONGAN DISTRICT NUMBER 150 2014 TECHNICAL GUIDELINES ON HANDLING LAMONGAN NEW MARKET IN THE MARKET

Afif Zulisanto*)

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Regional Director of Market Regulation Lamongan No. 150 of 2014 on Technical Guidelines for Management of Market in Lamongan one market is in New Market. Implementation is significant in improving the service management market is still found problems that occur in the field, including hygiene in the New Market Lamongan is still quite alarming, there's also garbage strewn in the market. Moreover, at some point the market is also still found a broken ceramic flooring market, leaky roofs and tiles so it is quite disturbing activities of traders in the rainy season. This study aimed to describe the implementation of the Regional Implementation Director of Market Regulation Lamongan No. 150 2014 About the Technical Guidelines for Management Market In New Market Lamongan.

This type of research is a descriptive study. By using qualitative research methods, while the focus of the study is variable, namely the implementation of the communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Researchers at the New Market location Lamongan. Informants consisted of PD Pasar, traders and buyers. Data validity checking techniques using triangulation. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. Data analysis techniques to study arranged systematically with data reduction, data presentation, drawing conclusions.

The results showed that views on the communication variables still found problems related to lack of socialization by PD Pasar to the merchant. Then linked variable disposition still found problems related to double job market between PD officers. Associated variable resource still found obstacles from the standpoint of market facilities which are now increasingly broken and not maintained as well as the variable structure of the bureaucracy of the executive in the bureaucratic structure of PD Pasar already perform the duties and functions of each, so expect the implementers can take into account every variable implementation ie related communication, bureaucratic structure, resources, and disposition. In order for the implementation of the Implementation Regulation of the Director of PD Pasar Lamongan District Number 15 Year 2014 About the Technical Guidelines for Handling Market in New Market Lamongan can run well by improving market facilities, meet regularly to socialize, and the policy implementers perform their duties and obligations in accordance with the objectives has been established.

Keywords: Implementation, Management Market

Pendahuluan

Pasar memegang peran penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat Indonesia. Selain muara dari produk-produk rakyat, pasar juga berfungsi sebagai tempat untuk bekerja yang sangat berarti bagi masyarakat. Pasar adalah tempat dimana terjadi interaksi antara penjual dan pembeli yang didalamnya terdapat tiga unsur yaitu: penjual, pembeli dan barang

atau jasa yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan (Maynardo, 2010:64)

Menurut Permadi (2007:49) pengertian pasar dibagi menjadi dua yakni pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional biasanya terdiri atas kios-kios atau gerai yang dibuka oleh penjual, kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan, berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, dan lain-lain. Pasar modern

sebenarnya tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri atau dilayani oleh pramuniaga atau pelayan.

Sedangkan menurut Nastiti (2003:75) bahwa pasar timbul karena kelebihan produksi setelah kebutuhan sendiri terpenuhi memerlukan tempat pengaliran untuk dijual, selain itu pemenuhan kebutuhan akan barang-barang memerlukan tempat yang praktis untuk mendapatkan barang-barang baik dengan menukar atau membeli. Keberadaan pasar tersebut sangat besar manfaatnya bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, karena pasar sebagai tempat pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan berkala atau kebutuhan sandang dan pangan juga sebagai sarana penunjang kemajuan perekonomian negara.

Pengertian pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres-RI) Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan, maupun sebutan lainnya. Keberadaan pasar, selama ini masih terdapat permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah daerah setempat. Menurut Kuncoro (2008:90), permasalahan umum yang dihadapi pasar adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya pedagang yang tidak tertampung di dalam pasar.
2. Stigma pasar yang mempunyai kesan kumuh.
3. Rendahnya kesadaran pedagang untuk mengembangkan usahanya dan menempati tempat yang sudah disediakan.
4. Status tanah pasar yang tidak jelas, sebagian tanah berstatus milik pemerintah daerah dan sebagian berstatus milik pemerintah desa.

5. Banyaknya pasar yang tidak beroperasi secara maksimal, karena adanya pesaing pasar lain sehingga perlu pemanfaatan lokasi secara efektif.
6. Masih rendahnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi.
7. Masih adanya pasar yang beroperasi pada hari pasaran.

Keberadaan pasar di Indonesia memiliki nilai yang sangat strategis. Menurut Kuncoro (2008:93) nilai strategis pasar terlihat dari besarnya jumlah pedagang yang berjumlah sekitar dua belas juta pedagang, kemudian adanya kenyataan bahwa pasar daerah merupakan pasar yang paling sering dikunjungi pembeli dimana masyarakat Indonesia melakukannya kurang lebih dua puluh lima kali dalam sebulan. Jumlah pasar di Indonesia saat ini tercatat 13.650 unit yang menampung 12,6 juta pedagang (KNLH, 2013). Apabila setiap pedagang mempunyai empat anggota keluarga, maka lima puluh juta rakyat Indonesia bergantung kehidupannya pada pasar. Setidaknya sampai saat ini keberadaan pasar masih dibutuhkan sebagai penopang kehidupan masyarakat (<http://www.depkominfo.go.id>).

Keberadaan pasar diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembeli, pedagang, pengelola pasar, dan pemerintah daerah. Pada era sekarang ini, tuntutan pengelolaan atau pengurusan pasar yang baik untuk meningkatkan berbagai fasilitas pelayanan publik di pasar, dibutuhkan kerjasama pengelola pasar dan pedagang.

Apabila pengelolaan pasar sudah baik, pembeli dan *stakeholders* akan memperoleh keuntungan. Pembeli akan memperoleh kemudahan dalam mendapatkan barang kebutuhan, memperoleh kenyamanan dan jaminan keamanan serta mendapatkan perlindungan akan hak-haknya. Bagi pedagang sendiri diharapkan akan mendapatkan layanan fasilitas yang lebih baik, mendapatkan kenyamanan dan keamanan, mendapatkan perlindungan akan hak-haknya, peningkatan jumlah pembeli

serta peningkatan pendapatan. Disamping itu, dengan pengurusan pasar yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi pengelola pasar dan Pemerintah Daerah berupa peningkatan Pendapatan Perusahaan Daerah Pasar dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengelolaan pasar di Kabupaten Lamongan saat ini dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan yang sebelumnya dikelola oleh BAPPEDA Kabupaten Lamongan. Perusahaan Daerah (P.D) Pasar adalah Perusahaan Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepengurusan pasar di Lamongan dikelola oleh P.D Pasar Kabupaten Lamongan yang diatur dalam Peraturan Direktur P.D Pasar Kabupaten Lamongan Nomor 150 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Pasar Kabupaten Lamongan. Peraturan Direktur P.D Pasar ini diharapkan dapat meningkatkan tertib administrasi dan keamanan pasar. Jenis pasar yang dikelola oleh P.D Pasar Kabupaten Lamongan saat ini terdapat 10 unit Pasar Daerah, yaitu Pasar Lamongan Baru, Pasar Modern atau Lamongan Plaza, Pasar Sidoharjo, Pasar Ikan, Pasar Babat, Pasar Agrobis, Pasar Blimbing atau Brondong, Pasar Maduran, Pasar Hewan Tikung dan Pasar Hewan Babat (Buku PDRB Kabupaten Lamongan Tahun 2013/2014).

Pasar Lamongan Baru merupakan salah satu Pasar Daerah yang menjadi pusat perbelanjaan masyarakat Kabupaten Lamongan, karena terdapat pedagang menengah atau grosir dan pedagang eceran yang menyediakan produk-produk pasar yang sangat beragam. Sebagaimana diakui oleh Bapak Totok Suhadi, selaku Kepala UPT Pasar di Pasar Lamongan Baru, Pasar Lamongan Baru terdiri atas 2 lantai dimana lantai 1 merupakan tempat pembeli yang menyediakan segala jenis makanan dan minuman khas daerah setempat (depot), souvenir, peralatan sekolah atau kantor, perlengkapan rumah tangga, plastik, mainan, peralatan listrik, elektronik, dan sebagainya. Sedangkan lantai 2 terdapat produk-produk *garment* mulai pakaian fashion, baju sekolah

atau kantor, peralatan sholat dan perlengkapan haji.

Pasar Lamongan Baru tersebut berdiri di lokasi yang strategis yakni di pusat jantung Kota Lamongan yang sudah berdiri kurang lebih 15 tahun. Jam operasional pasar ini mulai jam 07.00 WIB - 21.00 WIB. Pasar Lamongan Baru ini dibangun sejak tahun 1998 dengan luas bangunan 5914 m, dengan jumlah pedagang sebanyak 568 pedagang, Pasar Lamongan Baru memiliki kios 301 unit (Program Kerja P.D Pasar, 2014).

Berdasarkan observasi awal peneliti, permasalahan yang ditemui di Pasar Lamongan Baru diantaranya kebersihan pasar masih cukup memprihatinkan, masih banyak dijumpai sampah yang berserakan di dalam pasar. Selain itu, di beberapa titik pasar juga masih dijumpai keramik lantai pasar yang pecah, atap dan genting yang bocor sehingga cukup mengganggu aktivitas pedagang di saat musim penghujan tiba, karena air menggenangi pasar sehingga mengganggu orang berjalan. Observasi awal peneliti tersebut juga didukung oleh pernyataan Bapak Totok Suhadi, selaku Sekertaris P.D Pasar yang menyatakan genangan air terjadi karena talang yang rusak pada banyak bagian, ditambah dengan saluran air dan tutup got yang tidak berfungsi, sehingga bila terjadi hujan lebat air hujan meluber.

Selain itu, Bapak Totok Suhadi juga menyebutkan bahwa di dalam peraturan Direktur P.D Pasar Nomor 150 Tahun 2014, pasal 5 point e menjelaskan bahwa larangan pedagang untuk menggelar dagangannya melebihi luas yang ditetapkan, namun kenyataannya di lapangan masih banyak ditemui pedagang yang menggelar barang dagangannya melebihi batas yang ditetapkan. Permasalahan diatas merupakan permasalahan implementasi kebijakan yang harus segera ditindaklanjuti oleh pihak P.D Pasar. Agar tujuan pengelolaan pasar sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan, maka harus diimplementasikan dengan baik. Implementasi program kebijakan merupakan salah satu aspek yang

sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan suatu program.

Merujuk pada keadaan Pasar Lamongan Baru dengan berbagai permasalahan implementasi kebijakannya, perlu adanya kajian kebijakan untuk menyelesaikan masalah. Sejalan dengan hal tersebut, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan ini, dengan menggunakan teori George Edward III. Implementasi ini dimulai dari kondisi abstrak dan dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George Edward III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), sikap (*dispotion*) dan struktur birokrasi (*bereucratic structure*). Pendekatan George Edward III ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang telah dilaksanakan dan sejauh mana keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi dari suatu peraturan yang sudah ditetapkan, sebagai salah satu pemenuhan fungsi dari pemerintah sendiri sebagai pengaturan atau regulasi dan sejauh mana peraturan mendapat perhatian dan partisipasi para pelaksana sehingga kebijakan akan terealisasi dengan baik apabila mendapat dukungan penuh dari semua unsur pelaksana kebijakan yang pada akhirnya akan tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka dalam penelitian ini diangkat sebuah judul skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Direktur Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan Nomor 150 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Pasar di Pasar Lamongan Baru"

Kajian Pustaka

Kebijakan Publik

Pemahaman terhadap arti ataupun makna dari kebijakan publik telah dicoba untuk didiskusikan dan diperdebatkan oleh para ahli. Diskusi dan perdebatan tersebut dalam banyak

hal tetap dapat menunjukkan betapa kebijakan publik memiliki fungsi yang sangat penting untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik sekaligus studi yang sangat *crucial*. Bersifat *crucial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Kebijakan publik yang telah diformulasikan secara matang akan menjadi tidak berguna jika tidak diimplementasikan karena tidak ada tindakan nyata untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari kebijakan publik tersebut (Winarno, 2012:36).

Unsur-Unsur Implementasi

Tachjan (2006:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

- a. Unsur pelaksana
- b. Adanya program yang dilaksanakan serta
- c. *Target group* atau kelompok sasaran.

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan Dimock & Dimock dalam Tachjan (2006:28) sebagai berikut:

"Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian."

Pihak yang terlibat penuh dalam implementasi kebijakan publik adalah birokrasi seperti yang dijelaskan oleh Ripley dan Franklin dalam Tachjan (2006:27) menyatakan bahwa:

“Bureaucracies are dominant in the implementation of programs and policies and have varying degrees of importance in other stages of the policy process. In policy and program formulation and legitimization activities, bureaucratic units play a large role, although they are not dominant”

Dengan begitu unit-unit birokrasi menempati posisi dominan dalam implementasi kebijakan yang berbeda dengan tahap formulasi dan penetapan kebijakan publik dimana birokrasi mempunyai peranan besar namun tidak dominan.

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Hal ini dikemukakan oleh Grindle dalam Tachjan (2006:31) bahwa *“Implementation is that set of activities directed toward putting out a program into effect”*.

Menurut Terry dalam Tachjan (2006:31) program merupakan :

“A program can be defined as a comprehensive plan that includes future use of different resources in an integrated pattern and establish a sequence of required actions and time schedules for each in order to achieve stated objective. The make up of a program can include objectives, policies, procedures, methods, standards and budgets”

Maksudnya, program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget. Pikiran yang serupa dikemukakan oleh Siagian dalam Tachjan (2006:32-33) bahwa program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Sasaran yang dikehendaki ,
- b. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu,
- c. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya,
- d. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan dan
- e. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan

Selanjutnya, Grindle dalam Tachjan (2006:35) menjelaskan bahwa isi program harus menggambarkan:

“Kepentingan yang dipengaruhi (interest affected), jenis manfaat (type of benefit), derajat perubahan yang diinginkan (extent of change envisioned), status pembuat keputusan (site of decision making), pelaksana program (program implementers) serta sumber daya yang tersedia (resources committed)”.

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap yaitu:

- a. Merancang bangun (*design*) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.
- b. Melaksanakan (*application*) program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
- c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan

Unsur yang terakhir adalah *target group* atau kelompok sasaran, Tachjan (2006:35) mendefinisikan bahwa *Target group*

yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

Model Implementasi Kebijakan Publik

Berdasarkan beberapa teori yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka peneliti memilih pendekatan yang dikemukakan oleh George Edward III, yang dianggap relevan dengan materi pembahasan dari obyek yang diteliti. Hal ini bukan berarti bahwa peneliti menjustifikasi teori-teori lain tidak lagi relevan dengan perkembangan teori implementasi kebijakan publik, melainkan lebih mengarahkan kepada peneliti agar lebih fokus terhadap variabel-variabel yang diteliti melalui penelitian ini, sehingga membantu dalam menjawab tujuan dari penelitian ini. Edward III. Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III adalah sebagai berikut:

“Policy implementation as we have seen is the stage of policy making between the establishment of a policy such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule and the consequences of the policy for the people whom it affects”(Edward III, 2011:90).

Implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diketahui melalui variabel atau faktor-faktor penentunya. Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang

berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan. George Edwards III berpendapat dalam model implementasi kebijakannya bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor sebagai berikut:

a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2013:96).

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transmission*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait.

Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

b. Sumber Daya (*Resource*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam (Widodo, 2013:98) mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2) Anggaran (*Budgetary*)

Anggaran dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

3) Fasilitas (*Facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait mengenai bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

c. Sikap Pelaksana (*Disposition*)

Agustino (2008:152), menjelaskan bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George Edward C. III, adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah salah satu faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Menurut George Edward C. III dalam Budi Winarno (2012: 197), faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan pada variabel disposisi adalah :

1) Pengangkatan Birokrat

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan

personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khususnya pada kepentingan warga.

2) Insentif

Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini meliputi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standard Operation Procedure (SOP)*. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Metodologi Penelitian

Berdasarkan tujuannya penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Arikunto (2009:243) menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.

Fokus penelitian ini adalah mengenai Implementasi Peraturan Direktur P.D Pasar Kabupaten Lamongan Nomor 150 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Pasar di Pasar Lamongan Baru. Adapun yang menjadi fokus penelitian untuk mengukur keberhasilan implementasi Peraturan Direktur P.D Pasar adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi berikut:

1. Dari faktor komunikasi yang akan di kaji adalah:
 - a. Penyaluran komunikasi dalam pelaksanaan Peraturan Direktur P.D Pasar Kabupaten Lamongan Nomor 150 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Pasar di Pasar Lamongan Baru.
 - b. Kejelasan informasi yang di terima oleh pelaksana.
 - c. Konsistensi perintah dalam pelaksanaan kebijakan
2. Dari faktor sumber daya yang akan di kaji adalah:
 - a. Staff yang menjalankan kebijakan.
 - b. Anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kebijakan.
 - c. Fasilitas yang ada mendukung keberlangsungan pelaksanaan kebijakan.
 - d. Informasi mengenai pelaksanaan kebijakan dan juga pelaksana kebijakan.
 - e. Kewenangan dari para pelaksana kebijakan.
3. Dari faktor disposisi yang akan di kaji adalah:
 - a. Sikap dari para pelaksana kebijakan.
 - b. Komitmen para pelaku kebijakan.

4. Dari faktor struktur birokrasi yang akan di kaji adalah:
 - a. *Standart Operational Procedure (SOP)* dalam pelaksanaan kebijakan.
 - b. Struktur birokrasi dalam aktivitas organisasi pelaksanaan kebijakan.

Penelitian ini dilakukan di Pasar Lamongan Baru Jl. Laras-Liris, Kabupaten Lamongan karena merupakan instansi yang berwenang salah satunya mengenai pengurusan pasar di Kabupaten Lamongan. Pasar Lamongan Baru menjadi pilihan penulis, karena keberadaannya terletak di pusat jantung kota Kabupaten Lamongan. Selain itu, Pasar Lamongan Baru merupakan pusat perbelanjaan di Kabupaten Lamongan yang menyediakan beragam barang dagangan kebutuhan yang di nilai memenuhi kebutuhan masyarakat Lamongan. Sehingga peneliti tertarik untuk melihat pelaksanaan kebijakan kepengurusan pasarnya.

Teknik pengumpulan yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji kualitas data menggunakan teknik triangulasi, Adapun pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dapat dilakukan kepada pihak-pihak yang relevan dijadikan informan penelitian, yakni

1. Pihak P.D Pasar, antara lain:
 - a. Bapak Ir. Djoko Purwanto, MM, selaku Direktur P.D Pasar Kabupaten Lamongan.
 - b. Bapak Totok Suhadi, selaku Kepala UPT Pasar Lamongan Baru.
 - c. Ibu Titin selaku Kepala Bagian Fungsional P.D Pasar, di Pasar Lamongan Baru.
 - d. Bapak Irawan selaku Bagian Administrasi P.D Pasar, di Pasar Lamongan Baru.
 - e. Ibu Yuliarti selaku Bendahara P.D Pasar, di Pasar Lamongan Baru.
 - f. Martino selaku Juru Pungut P.D Pasar, di Pasar Lamongan Baru.

g. Aris selaku Petugas Keamanan P.D Pasar, di Pasar Lamongan Baru.

h. Muclis selaku Petugas Kebersihan P.D Pasar, di Pasar Lamongan Baru.

2. Ibu Fenny, Ibu Nia, Bapak Ghofur, H.Chozin, Ibu Ferry, Bapak Ayik , selaku Pedagang yang mempunyai kios atau toko di Pasar Lamongan Baru yang ditemui secara acak di lokasi penelitian.
3. Rani dan Tono, selaku Pembeli atau pengunjung di Pasar Lamongan Baru yang ditemui secara acak di lokasi penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Melihat pada hasil penelitian yang di peroleh dari indikator-indikator keberhasilan implementasi kebijakan dalam pelaksanaan Peraturan Direktur P.D Pasar Kabupaten Lamongan Nomor 150 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Pasar di Pasar Lamongan Baru, maka dapat dilakukan analisis program tersebut sesuai dengan teori berdasarkan empat indikator yang disebutkan oleh George C Edward.

Untuk memperoleh penjelasan baik atau buruknya pelaksanaan Peraturan Direktur P.D Pasar tersebut, maka setiap indikator yang telah disebutkan, di lihat dalam bentuk nyata melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh para pelaksana program. Unsur-unsur dalam implementasi kebijakan merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan Peraturan Direktur P.D Pasar Kabupaten Lamongan Nomor 150 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Pasar di Pasar Lamongan Baru diantaranya adalah unsur program yang akan dilaksanakan, unsur pelaksana dan target group.

Unsur program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Sesuai dengan hasil penelitian yang di dapat, program yang akan dilaksanakan di lokasi penelitian adalah Implementasi Peraturan Direktur P.D Pasar Kabupaten Lamongan Nomor 150 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Pengurusan Pasar di Pasar Lamongan Baru.

Pada dasarnya pengelolaan pasar di Kabupaten Lamongan saat ini dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan. P.D Pasar adalah Perusahaan Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pasar ini diharapkan dapat meningkatkan tertib administrasi dan keamanan pasar.

Program kerja adalah rancangan dasar mengenai suatu pekerjaan, petunjuk pelaksanaan, target, pembagian tugas tanggung jawab, sarana prasarana dan segala hal penting mencakup semua unsur demi kesuksesan program. Program yang ditetapkan P.D Pasar adalah tercapainya pendapatan operasional yang telah ditetapkan oleh P.D Pasar Kabupaten Lamongan.

Kegiatan merupakan kombinasi antara kemampuan dan usaha untuk menghasilkan sesuatu dari apa yang dikerjakan. Agar menghasilkan kinerja yang baik, perusahaan harus memiliki kemampuan, mempunyai kemauan, usaha serta kegiatan yang dilaksanakan, agar tidak mengalami hambatan yang berat dalam lingkungannya. Kemauan dan usaha dapat menghasilkan motivasi sehingga menimbulkan sebuah kegiatan untuk mencapai target group yang telah ditetapkan.

Target Group yaitu pihak yang menerima pelayanan kepengurusan pasar yaitu pedagang Pasar Lamongan Baru. Setiap pedagang Pasar Lamongan Baru berkewajiban untuk melaksanakan Peraturan Direktur P.D Pasar tersebut dan berkewajiban untuk membayar retribusi atas hak pakai toko/kios/los yang dipakai tempat usahanya.

Unsur Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, melaksanakan operasional, pengawasan serta penilaian.

Dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Direktur P.D Pasar Kabupaten Lamongan Nomor 150 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Pasar di Pasar Lamongan Baru diberikan tanggungjawab oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan untuk menangani kepengurusan pasar. Pemberian tugas dan tanggungjawab dalam kepengurusan pasar tersebut berdasarkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi dari P.D Pasar Kabupaten Lamongan.

Setiap karyawan mempunyai suatu komitmen yang terdiri dari identifikasi, keterlibatan serta loyalitas dalam usaha pengembangan perusahaan yang ditempati demi mencapainya tujuan perusahaannya. Dimana identifikasi berarti setiap karyawan harus memiliki kepercayaan kepada nilai-nilai perusahaan atau organisasi tersebut. Keterlibatan berarti berusaha sebaik mungkin demi kepentingan perusahaan yang bersangkutan dan terakhir adalah loyalitas yang diharapkan kegiatan karyawan untuk tetap menjadi anggota dari perusahaan tersebut.

Untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan, maka Kepala P.D Pasar Kabupaten Lamongan menghimbau dan memberi tanggung jawab kepada seluruh staffnya untuk melaksanakan tugas sesuai tupoksi yang diberikan Direktur P.D Pasar Kabupaten Lamongan dengan penuh tanggung jawab dan kedisiplinan. Disamping itu, pedagang Pasar Lamongan Baru juga diharapkan dapat bekerjasama dan bertanggungjawab akan kewajibannya agar tujuan Peraturan Direktur P.D Pasar Kabupaten Lamongan Nomor 150 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Pasar di Pasar Lamongan Baru dapat terimplementasikan dengan baik.

Sesuai dengan hasil penelitian yang di dapat dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Direktur P.D Pasar Kabupaten Lamongan Nomor 150 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Pasar di Pasar Lamongan Baru dengan menggunakan teori implementasi yang telah dipilih untuk menjadi dasar dari baik atau tidaknya suatu kebijakan. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori implementasi George Edward III.

Dimana didalam teori tersebut terdapat 4 indikator yang mempengaruhi tentang keberhasilan suatu kebijakan. Indikator yang ada yaitu meliputi komunikasi, sumber daya, diposisi dan struktur birokrasi. Berikut analisis variabel Implementasi Peraturan Direktur P.D Pasar Kabupaten Lamongan Nomor 150 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Pasar di Pasar Lamongan Baru:

1. Komunikasi

Variabel komunikasi menurut George C. Edward sangat berpengaruh terhadap pencapaian suatu keberhasilan implementasi kebijakan. Persyaratan yang pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Komunikasi harus akurat dan harus konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Berdasarkan variabel komunikasi dari sudut sosialisasi menurut hasil penelitian masih terbilang kurang baik, karena dilihat dari segi komunikasi para pelaksana program masih belum maksimal dalam melakukan sosialisasi kepengurusan pasar. Selama ini para pelaksana program hanya menyampaikannya melalui surat edaran, tanpa diadakan pertemuan rutin dengan para pedagang Pasar Lamongan Baru.

Pada hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan bahwa masih banyak pedagang pasar khususnya pedagang Pasar Lamongan Baru yang belum mengetahui dan memahami dengan jelas mengenai kebijakan Peraturan Direktur P.D Pasar Kabupaten Lamongan Nomor 150 Tahun 2014 tersebut.

Jika di lihat dari hasil wawancara yang diterima, masalah yang terjadi akibat kurang adanya sosialisasi pertemuan rutin pihak pelaksana dengan pedagang Pasar

Lamongan Baru mengakibatkan pembayaran retribusi daftar ulang penggunaan kepemilikan toko atau los bermasalah. Salah satunya tentang kenaikan retribusi dari tahun 2013 sampai dengan 2014 belum adanya perubahan peningkatan kenaikan ataupun adanya selisih jumlah retribusi dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan selain sosialisasi P.D Pasar juga karena kurang adanya sanksi yang tegas mengenai kewajiban membayar pendaftaran ulang toko tersebut kepada Pedagang Pasar Lamongan Baru.

2. Sumber Daya

Variabel sumber daya dalam implementasi kebijakan juga berperan penting untuk mencapai keberhasilan suatu implementasi. Dimana hal ini perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber daya dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik.

Pelaksanaan kebijakan Implementasi Peraturan Direktur P.D Pasar Kabupaten Lamongan Nomor 150 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Pasar di Pasar Lamongan Baru, sumber daya yang ada dapat dikatakan kurang jumlahnya. Terkait tentang ketersediaan petugas P.D Pasar yang dirasa kurang sebagai pelaksana kebijakan dikarenakan masih banyaknya petugas yang tumpang tindih (*overlapping*) dalam menjalankan tugasnya.

Sedangkan dari segi fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada para pelaksana kebijakan dirasa cukup. Adanya fasilitas seperti: toilet, musholla, Pos keamanan, ATM Center, Tempat Pembuangan Sampah Sementara dan Drainase (Saluran Air) sudah tersedia dan sangat berguna dalam membantu kinerja pelaksana kepengurusan pasar, namun banyaknya pedagang Pasar Lamongan

Baru yang mengeluh dengan fasilitas pasar mengenai atap atau genting yang bocor, lantai retak, yang belum di renovasi seutuhnya sehingga menyebabkan para pedagang malas atau acuh membayarkan iuran wajibnya.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya para pelaksana kebijakan telah dilengkapi dengan Surat Keputusan Peraturan Direktur P.D Pasar Kabupaten Lamongan Nomor 150 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Pasar Kabupaten Lamongan sehingga para petugas dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai informasi yang telah diterima melalui petunjuk teknis operasional yang telah diberikan. Disamping itu, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya para pelaksana kebijakan mempunyai wewenang dalam menangani masalah yang dihadapi di lapangan.

3. Sikap Pelaksana (Disposisi)

Agar pelaksanaan suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik maka sikap dari pelaksana kebijakan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi kebijakan tidak akan terlaksana dengan baik.

Dalam pelaksanaan kebijakan Implementasi Peraturan Direktur P.D Pasar Kabupaten Lamongan Nomor 150 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Pasar di Pasar Lamongan Baru menurut hasil penelitian di lapangan sikap para pelaksana kebijakan bisa dikatakan pengurusan pasar di Pasar Lamongan Baru masih perlu adanya penanganan lebih tegas. Hal ini dikarenakan sikap pelaku kebijakan yang kurang tegas dan bertanggungjawab sehingga banyak protes dari pedagang.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Menurut George C. Edward, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *standart operational procedure* (SOP) dan fragmentasi. Karakteristik yang pertama adalah prosedur-prosedur kerja, ukuran-ukuran dasar atau sering disebut *standart operational procedure* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Karakteristik yang kedua adalah fragmentasi. Pelaksanaan fragmentasi merupakan upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktifitas-aktifitas pegawai di antara beberapa unit kerja. Jadi suatu implementasi kebijakan membutuhkan pembagian tugas dari beberapa unit untuk melaksanakannya. Kerjasama antar unit sangat mendukung implementasi kebijakan. Pembagian tugas semacam ini akan lebih efektif karena melibatkan semua pihak.

Struktur birokrasi P.D Pasar di Pasar Lamongan Baru adalah struktur organisasi garis atau lini. Tipe organisasi hanya mengenal satu pimpinan, dimana wewenang mengalir dari pimpinan kepada bawahan melalui garis lurus, sedangkan bawahan bertanggungjawab langsung kepada atasan sesuai bidangnya masing-masing. Arah pertanggungjawaban dimulai dari Badan Pengawas yang paling tinggi kemudian Direktur. Bagi pimpinan yang bukan garis kewenangan tidak berhak memerintah atau menerima pertanggungjawaban pegawai bagian lain yang bukan wewenangannya, dengan bentuk organisasi tersebut maka setiap pimpinan mempunyai wewenang dan tanggungjawab tugas.

Para pelaksana kebijakan Implementasi Peraturan Direktur P.D Pasar Kabupaten Lamongan Nomor 150 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Pengurusan Pasar di Pasar Lamongan Baru dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan prosedur kerja yang sudah ada, namun pada pelaksanaannya di lapangan nampaknya masih terjadi tumpang tindih (*overlapping*) antar implementor pada pelaksanaan kepengurusan pasar di Pasar Lamongan Baru. Terbukti bahwa staff P.D Pasar bidang sarana dan prasarana juga merangkap tugas sebagai bidang kebersihan dan keamanan parkir pasar.

Simpulan dan Saran

Kesimpulan terkait dengan Implementasi Peraturan Direktur P.D Pasar Kabupaten Lamongan Nomor 150 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Pasar di Pasar Lamongan Baru di lihat dari empat variabel yang sesuai dengan teori implementasi George Edward antara lain yaitu:

Implementasinya dipengaruhi oleh variabel komunikasi yang meliputi transmisi, kejelasan, konsistensi. Didalam variable komunikasi ini ditemukan sedikit kendala, yaitu terkait kejelasan penyampaian informasi mengenai Peraturan Direktur P.D Pasar Kabupaten Lamongan Nomor 150 Tahun 2014. Pada variabel komunikasi masih dikatakan belum cukup baik karena dalam implementasi kebijakan ini sosialisasi kepada pedagang masih kurang, khususnya pedagang Pasar Lamongan Baru. Hal ini dikarenakan tidak ada rapat rutin atau pertemuan antar pelaksana kebijakan yakni pihak P.D Pasar dengan para pedagang Pasar Lamongan Baru.

Implementasi dipengaruhi oleh variabel sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, wewenang, fasilitas dan informasi. Dalam variabel sumber daya masih dikatakan belum cukup baik karena dalam implementasi terkait sumber daya manusia yaitu jumlah petugas P.D Pasar yang dirasa masih kurang karena masih terdapat petugas yang melakukan tumpang tindih (*overlapping*) dalam menjalankan tugasnya. Anggaran yang dimiliki P.D Pasar saat ini belum mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pedagang Pasar Lamongan Baru banyak yang mengeluh dengan fasilitas pasar yang sekarang semakin rusak dan tidak terawat. Meskipun pihak P.D Pasar mempunyai wewenang dalam menangani masalah yang dihadapi di lapangan, namun kenyataan di lapangan pihak P.D Pasar belum dapat merenovasi pasar tersebut seutuhnya.

Implementasi juga dipengaruhi oleh variabel disposisi yakni sikap para pelaksana kebijakan sudah disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku. Para pelaksana kebijakan juga memiliki komitmen yang baik agar kebijakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh P.D Pasar, namun pada pelaksanaannya di lapangan nampaknya masih terjadi tumpang tindih pekerjaan antar implementor pada pelaksanaan kepengurusan pasar di Pasar Baru Kabupaten Lamongan. Hal ini dikarenakan sikap pihak P.D Pasar yang merasa sudah cukup dengan sumber daya yang ada untuk melaksanakan tugas dan kegiatan Pasar Lamongan Baru.

Implementasi juga dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang meliputi *standart operation procedure* (SOP) dan fragmentasi. Para pelaksana yang ada dalam struktur birokrasi P.D Pasar sudah melakukan pembagian tugas dari beberapa unit untuk melaksanakan kebijakan dan setiap unit pelaksana kebijakan sudah mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing.

Beberapa saran yang dapat digunakan pada masa mendatang agar Implementasi Peraturan Direktur P.D Pasar Kabupaten Lamongan Nomor 150 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Pasar di Pasar Lamongan Baru dapat berjalan dengan baik, berikut saran yang diberikan:

1. Diharapkan kepada para petugas dari pihak P.D Pasar untuk mengadakan pertemuan rutin dengan tujuan bersosialisasi dan bekerjasama kepada pedagang Pasar Lamongan Baru agar pedagang mengetahui dengan jelas mengenai Implementasi Peraturan Direktur P.D Pasar Kabupaten Lamongan Nomor 150 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Pasar.

2. Diharapkan kepada para pelaksana agar memperhitungkan faktor sumber daya terkait menambah jumlah petugas untuk mengorganisir tugas dan kewajiban masing-masing dengan baik agar tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) dalam menjalankan tugasnya diantara para pelaksana kebijakan.
3. Diharapkan pihak pelaksana dari P.D Pasar hendaknya segera memperbaiki fasilitas pasar agar pembeli nyaman berbelanja di Pasar Lamongan Baru .
4. Diharapkan pihak pelaksana kebijakan melakukan tugasnya sesuai dengan tujuan kegiatan, agar tujuan dari kegiatan dapat tercapai dengan optimal sehingga hasil yang diperoleh akan lebih maksimal.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Buku PDRB Kabupaten Lamongan Tahun 2013/2014
- Buku Pedoman Program Kerja P.D Pasar Kabupaten Lamongan, 2014.
- Buku Pedoman Prgram Kerja Tahun 2015 Unit Pasar Baru Kabupaten Lamongan.
- Buku Pedoman Peraturan Direktur P.D Pasar Kabupaten Lamongan Nomor 150 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Pasar.
- D., Riant nugroho.2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kuncoro, Mudrajat. 2008. *Strategi Pengembangan Pasa Modern*. Bandung : Alfabeta
- Maynardo, Brian. 2010. *Perbedaan Antara Pasar Modern dan Pasar Tradisional*.<http://a67532.wordpress.com/category/tugas-softskill/perbedaan-antara-pasar-modern-dan-pasar-tradisional.html>.Diakses Jumat, 16 Maret 2015. Pukul 17.26 WIB.
- Moleong, J, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nastiti. 2003. *Perbedaan Antara Pasar Modern dan Pasar Tradisional*.<http://a67532.wordpress.com/category/tugas-softskill/perbedaan-antara-pasar-modern-dan-pasar-tradisional.html>. Diakses Senin, 16 Maret 2015. Pukul 17.26 WIB.
- Patilima, Hamid. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres-RI) Nomor 112 Tahun 2007.
[http:// koperindag. Karokab.go.id](http://koperindag.karokab.go.id). Diakses Senin, 16 Maret 2015. Pukul 17.26 WIB.
- Permadi, Gilang. 2007. *Pedagang Kaki Lima*. Jakarta: Yudhistira
- Soetari, Endang. 2014. *Pengantar Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Aipi (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia).
- Wahab,Solihin Abdul. 2014.*Analisis Kebijaksanaan:Dari Formulasi ke*

***Implementasi Kebijakan
Negara.*** Jakarta:PT.Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2013. ***Analisis Kebijakan
Publik Konsep dan Aplikasi Analisis
Proses Kebijakan Publik.*** Malang:
Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi.2002. ***Teori dan Proses
Kebijakan Publik.***
Yogyakarta:Media
Pressindo.

<http://www.depkominfo.go.id>